

SPOTLIGHT ON

Social Monitoring and Early Response Unit

Welcome to the first edition of SMERU's regular monthly newsletter. Let's begin with some explanation of who we are. SMERU is not the active volcano on Java but is the Social Monitoring and Early Response Unit, an organization supported and directed by the World Bank, with the special assistance of a number of donor agencies, in particular AusAID, ASEM and USAID. It has been established as a monitoring unit with the specific purpose of providing qualitative information about the social impacts of the current Indonesian crisis with accurate and up-to-date reports from a variety of sources about the most important and pressing crisis-related issues as they emerge.

A variety of monitoring efforts have already been established both by Government and various donor agencies. These monitoring bodies are already working both to assess the extent of the crisis itself and the impact of those programs which have been put in place to address the crisis. Why another effort? We are not setting out to compete with or duplicate these efforts.

SMERU has been designed to complement and supplement existing monitoring projects with more emphasis on field-based qualitative reports. We aim to cooperate and collaborate with both Government and donor agencies and NGOs in our united attempts to understand the nature of the most urgent problems and how best to deal with these issues.

SMERU will undertake five specific tasks:

We will be mounting a capacity for rapid field assessments and directed social science. These rapid appraisals from the field will produce quick turnaround reporting on "danger" signals from specific localities and regions that are generated through the unit's information network, through field reports, and through the units' own assessment of trends and emerging issues (for example crop failures, food shortages, employment, health and education problems). To address specific thematic issues about the social crisis, the unit will also draw on the assistance of specialist social scientists, in conjunction with the NGO network and rapid assessment teams.

We will be working quickly to establish close cooperation with NGOs, principally by setting up an electronic communications network with NGO organizations throughout the country. Drawing on

Salam jumpa dengan edisi pertama 'buletin' bulanan SMERU. Mari kita mulai perkenalan ini dengan beberapa penjelasan tentang apa dan siapa kami ini sebenarnya. SMERU tentunya bukanlah sebuah gunung berapi di Jawa, tetapi merupakan suatu Unit Pemantauan Sosial dan Peringatan Dini, sebuah prakarsa yang didukung dan diarahkan oleh Bank Dunia, dan memperoleh bantuan khusus dari sejumlah badan penyanggah dana, terutama AusAID, ASEM dan USAID. SMERU didirikan sebagai sebuah unit pemantau yang bertujuan memberikan informasi kualitatif seputar krisis yang saat ini sedang melanda Indonesia, dengan laporan yang akurat dan terkini dari berbagai sumber tentang masalah penting dan paling mendesak, yang berhubungan dengan krisis.

Berbagai upaya pemantauan telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun berbagai penyanggah dana. Lembaga-lembaga pemantau tersebut sudah melaksanakan tugasnya dalam menilai krisis itu sendiri dan dampak dari program-program yang diterapkan dalam mengatasi krisis dimaksud. Mengapa ada upaya lain? Kami tidak berniat untuk bersaing dengan atau melakukan duplikasi terhadap upaya-upaya pemantauan tersebut. SMERU dirancang untuk melengkapi proyek-proyek pemantauan yang sekarang sudah ada dengan penekanan pada laporan kualitatif dari hasil penelitian lapangan. Kami akan menggalang kerjasama baik dengan pemerintah maupun lembaga penyanggah dana dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam sebuah upaya terpadu untuk secara bersama berusaha memahami karakter dari masalah-masalah yang paling mendesak dan menemukan jalan terbaik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

SMERU memiliki lima tugas khusus:

Kami akan mengembangkan kemampuan untuk melakukan penilaian kondisi lapangan secara cepat dan melalui pengarahannya ilmu sosial. Pemahaman secara cepat ini akan menghasilkan laporan yang cepat mengenai adanya tanda-tanda bahaya yang berasal dari lokasi-lokasi atau daerah-daerah tertentu. Laporan tersebut dihasilkan melalui jaringan informasi SMERU, laporan dari lapangan, atau pengamatan secara aktif mengenai perkembangan dan masalah-masalah yang terjadi (misalnya, kegagalan panen, kelangkaan pangan, dan masalah-masalah lapangan kerja, kesehatan dan pendidikan). Untuk menanggapi masalah-masalah tematis tertentu tentang krisis sosial, disamping memanfaatkan jaringan LSM dan tim

the local knowledge generated by the activities of domestic and international NGOs in the course of their regular field operations, we hope to use this network to assist us in directing our field research teams and also as a means of channeling and filtering information useful to policy makers. This network will also be a vital element in SMERU's efforts to develop the community monitoring program, by creating a two-way flow of information with local groups about donor and Government safety net activities.

SMERU will work with government and NGOs to help develop the capacity of communities to conduct their own community-based monitoring of Government programs, serving as a means to disseminate information about the design and intended operation of the key social safety net programs. Armed with this information, NGOs and local groups can be used as partners in reporting on the effectiveness of a wide variety of Government and NGO-financed programs by establishing specific mechanisms for query and feedback.

SMERU is also to provide a stable home for the ongoing analysis of quantitative data sets generated by the World Bank, such as the Kecamatan and education surveys. This quantitative data and its analysis will feed into the qualitative work of SMERU, and vice versa, to provide a picture that integrates both into policy relevant messages.

In connection with our local fieldwork and interests in local issues, we will also be conducting a special study of the provincial deregulation program, by sending field teams to monitor the implementation, effectiveness and impact of provincial and local trade deregulation throughout the country.

The SMERU project is under the general direction of Andrea Silverman of the World Bank's Jakarta office. Sudarno Sumarto is coordinating the data analysis and provincial deregulation agenda. John Maxwell is coordinating the crisis monitoring field teams and the directed social science research activities. Alexander Irwan is coordinating the community monitoring program. In addition a talented and concerned team of researchers and field workers is nearly in place.

Why a newsletter? Because we believe that having information spread and discussed as widely as possible is a central part of creating the social conditions for addressing the social crisis. This newsletter hopes to not only distribute as widely as possible our qualitative and quantitative findings but also the views and findings of other individuals and groups, including some we may not agree with in the spirit of open discussion. In addition to the newsletter we hope to make much of the detailed background material available at our future website.

In our first newsletter we examine several aspects of the all important food security issue, especially the

penilai gerak cepat, SMERU juga akan memanfaatkan bantuan ilmuwan ahli sosial.

Kami akan bekerja cepat mengembangkan kerjasama yang erat dengan LSM, terutama dengan membangun jaringan komunikasi elektronik dengan LSM di seluruh Indonesia. Dengan memanfaatkan pengetahuan daerah setempat yang berasal dari aktivitas sehari-hari LSM, baik domestik maupun asing, kami berharap jaringan ini akan bisa membantu kami dalam mengarahkan tim-tim riset kami dan dalam menyalurkan serta menyaring informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan. Jaringan ini juga akan merupakan unsur vital bagi upaya SMERU dalam mengembangkan program pemantauan komunitas setempat dengan menyediakan sarana informasi dua arah dengan kelompok-kelompok setempat mengenai kegiatan-kegiatan pengaman sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penyandang dana.

SMERU akan bekerja dengan pemerintah dan LSM untuk membantu dan mengembangkan kemampuan komunitas-komunitas di seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan sendiri terhadap program-program pemerintah dengan menyebarkan informasi mengenai perancangan dan pelaksanaan program-program kunci jaring pengaman sosial. Dilengkapi dengan informasi tersebut, LSM dan kelompok-kelompok setempat dapat berfungsi sebagai mitra dalam melaporkan efektivitas berbagai program yang dibiayai pemerintah dan LSM dengan menciptakan mekanisme khusus untuk pertanyaan dan umpan baliknya.

SMERU juga akan menyediakan wadah untuk menampung hasil analisa data kuantitatif yang diprakarsai Bank Dunia seperti Survei Kecamatan dan Pendidikan. Data kuantitatif dan hasil analisa ini akan menjadi masukan bagi kegiatan kualitatif SMERU, atau sebaliknya, sehingga memberikan gambaran yang terpadu dalam penyampaian kebijaksanaan terkait.

Berkaitan dengan hasil kajian lapangan dan masalah-masalah setempat yang menarik, kami juga akan menyelenggarakan kajian khusus mengenai program deregulasi di tingkat propinsi dengan mengiriskan tim peneliti lapangan untuk memantau pelaksanaan, efektivitas, dan dampak dari deregulasi perdagangan di seluruh Indonesia.

Proyek SMERU berjalan di bawah arahan Andrea Silverman dari Bank Dunia - Jakarta. Sudarno Sumarto sebagai koordinator analisa data dan agenda deregulasi di tingkat Propinsi. John Maxwell sebagai koordinator tim pemantau krisis di lapangan dan pengarah penelitian sosial. Alexander Irwan sebagai koordinator program pemantauan komunitas setempat. Sebagai tambahan, tim peneliti dan pekerja lapangan akan senantiasa berada di tempat dan siap ke lapangan.

Mengapa 'buletin'? Karena kami percaya bahwa

problem of rice marketing and availability. In next month's issue we will focus on field assessments currently being conducted by SMERU of the government's 'Special Market Operations' program, which is aiming to provide emergency food assistance to the poorest sections of society.

informasi yang tersebar dan didiskusikan seluas mungkin merupakan bagian utama dalam rangka menciptakan kondisi-kondisi sosial untuk menanggulangi krisis sosial. Melalui penerbitan 'buletin' ini, diharapkan tidak hanya akan menyebarkan seluas mungkin penemuan kualitatif dan kuantitatif, namun juga memuat pandangan dan penemuan perorangan atau kelompok-kelompok, termasuk adanya kemungkinan perbedaan pendapat, dengan semangat diskusi terbuka. Sebagai tambahan, kami berharap dapat menyediakan bahan-bahan secara rinci dalam 'website' kami mendatang.

Pada 'buletin' pertama ini, kami mengkaji beberapa aspek yang sangat penting mengenai ketahanan pangan, terutama mengenai masalah ketersediaan dan pemasaran. Dalam edisi bulan depan, kami akan menurunkan laporan mengenai pengamatan lapangan yang sekarang sedang dilakukan oleh SMERU terhadap program pemerintah 'Operasi Pasar Khusus (OPK)', yang dirancang untuk memberikan bantuan pangan darurat kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

SMERU Invites You!

SMERU invites local and overseas NGOs to use the News in Brief column as a bulletin board about their past, present, and future programs attempting to address food, health, school, and labor-force problems. In addition to information about the programs themselves, we are also looking for information about experiences with planning, budgeting, implementation and monitoring. We hope that NGOs, the Indonesian government, as well as external support agencies who are contributing to the funding of the Social Safety Net programs, will be able to draw lessons from these experiences. In addition, we hope that the News in Brief column will play a useful role for those in need of contact and communication with other groups in the planning, operation, and monitoring of their programs. For further information, please contact Ms. Hariyanti Sadaly (our NGO Liaison Officer) at SMERU

SMERU mengundang LSM Indonesia maupun asing untuk memanfaatkan kolom 'News in Brief' ini sebagai sarana informatif mengenai program-program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan yang berkenaan dengan upaya-upaya penanggulangan masalah pangan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Selain program itu sendiri, pengalaman dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pemantauan juga sangat kami harapkan, untuk diinformasikan. Baik LSM, pemerintah Indonesia, maupun penyandang dana asing yang ikut membiayai program Jaring Pengaman Sosial (JPS), diharapkan untuk dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Kolom News in Brief ini juga bisa berfungsi sebagai media bagi mereka yang membutuhkan kontak dan komunikasi dengan pihak lain dalam merencanakan, menjalankan dan memantau program mereka. Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi Ibu Hariyanti Sadaly (Staf Pengurus LSM) di SMERU.

Food Relief Activities: YKSP

Hasil wawancara dengan William Kwan H. Liong, Project Executive - YKSP

Interview with William Kwan H. Liong, Project Executive Paramita - Social Welfare Foundation

With the socio-economic crisis that has recently occurred in Indonesia, serious food problems have to be endured by many of the less well-off members of society. To help them overcome difficulties in obtaining foodstuffs, there has been a lot of activity by Government and the wider Indonesian community (companies, national and international NGOs, religious institutions, individuals, and others) as well as international organizations. For this first edition, SMERU interviewed Bapak William Kwan H. Liong, Project Executive of the Paramita Social Welfare Foundation (YKSP), one of the NGOs distributing food aid to needy households. YKSP, formed in 1995 by a group of religious leaders and Buddhist entrepreneurs, has delivered approximately 10,000 food parcels (consisting of 10kg rice, 1kg sugar and 1/2kg of mung beans) during September-October 1998 to poor communities in North Jakarta, West Jakarta, Central Java, and East Java.

According to Pak Willi, Bapak William's nick name, the total amount of assistance distributed by YKSP is not the only indication of success. Success is also measured by the extent to which a sense of voluntary social responsibility is fostered in the program's volunteers.

YKSP has a unique method to deliver food aid. Pak Willi emphasized that although it is supported by

Di masa krisis yang kini sedang melanda Indonesia, kondisi rawan pangan menjadi suatu masalah serius khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Guna meringankan kesulitan mereka dalam memperoleh bahan pangan, telah banyak upaya yang dilakukan baik pemerintah, masyarakat (melalui perusahaan, LSM nasional dan internasional, organisasi keagamaan, individu, dan sebagainya), maupun lembaga internasional lainnya. Pada edisi pertama kali ini, SMERU melakukan wawancara dengan Bapak William Kwan H. Liong, Project Executive Yayasan Kepedulian Sosial Paramita (YKSP), salah satu LSM yang telah turut menyampaikan bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. YKSP yang didirikan oleh pemuka agama dan pengusaha beragama Budha pada tahun 1995 telah menyampaikan bantuan pangan kurang lebih 10.000 buah paket yang terdiri dari @ 10 kg beras, 1 kg gula pasir, dan ½ kg kacang hijau pada bulan September-Oktober 1998 kepada masyarakat yang kurang beruntung di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Sebagaimana diungkapkan Pak Willi, nama panggilan Pak William, indikator keberhasilan suatu kegiatan bukan hanya banyaknya bantuan yang dapat disalurkan (termasuk pangan) oleh YKSP melainkan seberapa jauh efek peningkatan rasa kepedulian sosial sukarelawan yang melakukan

funds from the Buddhist community, YKSP adheres to the principle of non-discrimination. Assistance is distributed strictly according to need and not according to religion, ethnicity, race, region, gender or the socio-political views of the recipients.

Pak Willi explained the method used to deliver food aid:

1. **The target area is determined** by using statistics from government or from other organizations, such as the official list of keluarga pra-sejahtera. However this data is only used as a preliminary indicator.
2. **Direct surveys by volunteers in the locations that are chosen.** In these surveys volunteers directly evaluate the appropriateness of the candidates to receive assistance based on several criteria (the physical condition of housing and the neighborhood, socio-economic conditions, etc.). Subsequently, food parcel coupons are distributed directly by the YKSP volunteers and staff to the less well-off families who are considered suitable candidates to receive assistance. To ensure that food reaches the most needy households, YKSP directly identifies and provides coupons to needy families, rather than asking local officials to distribute them. Although it seems that this method is difficult to implement, these surveys can actually be carried out quickly. For example, after receiving a briefing, 30 inexperienced student volunteers are able to conduct the survey and distribute coupons to 1,000 people in about three hours.
3. **The distribution of food parcels**, is conducted with the exchange of coupons for food parcels, either freely or by the payment of a previously agreed sum.

YKSP emphasizes that as long as a happy atmosphere and a commitment to helping others is maintained, the distribution of food parcels will always be attractive to volunteers and have an 'addictive' effect encouraging them to carry out further welfare work in the future.

In conclusion, Pak Willi emphasized that YKSP believes that it is essential to develop the enthusiasm for voluntary service by all members of society (without distinguishing religion, ethnicity, race, region, gender or socio-political views) to assist in working together to build a sense of self-confidence within the less well-off sections of the community in the midst of this present whirlwind socio-economic crisis.

kegiatan dimaksud. Selain itu YKSP memiliki keunikan dalam penyampaian bantuan pangan. Juga ditekankan oleh Pak Willi walaupun didukung oleh dana dari umat Budha, namun YKSP menganut prinsip non diskriminasi dalam menyalurkan bantuan. Bantuan disalurkan atas dasar kebutuhan dan bukan atas dasar pertimbangan agama, suku, ras, daerah, gender, maupun pandangan sosial politik dari penerima bantuan. Demikian juga prinsip non diskriminasi ini diterapkan dalam rangka rekrutmen staf dan sukarelawan.

Lebih jauh Pak Willi menjelaskan metoda yang digunakannya dalam melaksanakan bantuan pangan sebagai berikut :

1. **Daerah sasaran kegiatan** ditetapkan dengan menggunakan data statistik dari pemerintah atau organisasi lain, misal daftar keluarga pra sejahtera. Namun data ini hanya berfungsi sebagai indikator pembantu saja.
2. **Survei langsung oleh sukarelawan ke lokasi yang telah ditetapkan.** Pada survei ini, sukarelawan meneliti langsung kelayakan calon penerima bantuan berdasarkan beberapa kriteria teknis (fisik rumah/lingkungan, kondisi sosial ekonomi, dll). Selanjutnya kupon bahan pangan dibagikan langsung oleh petugas/sukarelawan YKSP kepada KK kurang mampu yang dianggap layak menjadi calon penerima bantuan. YKSP menyediakan dan menyampaikan kupon langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan tidak meminta aparat yang melakukannya. Walaupun nampak rumit, namun pada kenyataannya, survei ini dapat dilaksanakan dengan cepat. Sebagai contoh: setelah mendapatkan briefing, 30 orang sukarelawan mahasiswa yang belum berpengalaman dapat melakukan survei dan membagikan kupon kepada 1.000 orang dalam waktu sekitar 3 jam.
3. **Pelaksanaan** pembagian bahan pangan dilaksanakan dengan menukarkan kupon paket bahan pangan secara gratis atau membayar sebagian biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.

YKSP menekankan bahwa sepanjang suasana riang gembira dan komitmen membantu orang lain dijaga, kegiatan pembagian bahan pangan tersebut akan sangat menarik para sukarelawan dan dapat menimbulkan efek 'ketagihan' untuk melakukan lagi upaya berbuat kebajikan dalam kesempatan berikutnya.

Sebagai penutup, Pak Willi menekankan bahwa ia percaya perlunya pengembangan semangat kesukarela-wanan semua warga masyarakat (dengan tidak membedakan agama, suku, ras,

daerah, gender, ataupun pandangan sosial politik) untuk saling tolong menolong dalam membangun rasa percaya diri masyarakat kurang mampu di tengah badai krisis sosial ekonomi dewasa ini.

YKSP dipimpin oleh Dra. Siti Hartati Murdaya. Kegiatan YKSP lain yang telah dilakukan termasuk memberikan bantuan kesehatan, membantu pengusaha kecil makanan dan garmen dalam perbaikan akses pasar, teknologi, dan manajemen, dll, serta memberikan bantuan pendidikan dan keagamaan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: Jl. Abdul Muis 62, Jakarta Pusat; Phone : 021-351 8801, 351 8802; Fax: 021-351 8803.

YKSP is directed by Dra. Siti Hartati Murdaya. The Foundation's other activities include health aid, assistance to small-scale food and garment entrepreneurs with market access, technology, and management, as well as education aid and religious support. For further information, contact: Jl. Abdul Muis 62, Jakarta Pusat; Phone : 021-351 8801, 351 8802; Fax: 021-351 8803.

Recent Volatility in the Rice Market

Results of a SMERU Rapid appraisal in Central and East Java

In mid August a sudden surge in the price of rice in East Java and then throughout Indonesia, was the cause of considerable alarm, prompting calls for immediate intervention on the part of government. (See the graph on page 10 for an overview of price fluctuations during the August-October period). In an effort to understand what lay behind this unexpected market instability, a SMERU field research team traveled throughout Central and East Java during late September, visiting both urban and rural areas, including most of the significant rice basket regions of these provinces. During their investigations our team interviewed representatives of the key sectors of the rice industry: farmers, rice-mill operators, large and small rice traders and retailers, agricultural extension workers, and officials from BULOG and DOLOG.

When retail rice prices suddenly and inexplicably surged during mid August it was assumed in some quarters that this must be an indication of an actual or imminent shortage. However the SMERU research team did not find a problem of overall supply. Investigations revealed that the surge in retail prices was due to a number of other factors. These include: political uncertainty around the middle of August accompanied by widespread rumors about further social unrest; reluctance by traders and rice-mill owners to handle large quantities of rice; some reluctance by farmers to sell their harvest; and the failure of local DOLOG officials to act quickly to release additional supplies when needed.

The SMERU research team found that rice was freely available in the market place, in government warehouses, and in villages throughout both provinces where harvesting had already begun in August. Although rice production declined in the first half of 1998 due to the El Nino-related drought and a reduction in the use of fertilizers and pesticides, abundant rainfall during the dry season enabled extended rice plantings on land that would normally be given over to tobacco and other crops. At that time, local officials in many regions of both Central and East Java were reporting no significant decline in annual rice production levels.

It appears that the sudden price rise can be attributed, in the main, to widespread political uncertainty especially around the 17 August, Independence Day holiday when there were many alarmist rumors (widely reported in the Indonesian press) of a fresh outbreak of anti-government demonstrations and the likelihood of further rioting and looting, especially threatening to the Chinese-Indonesian community. As a result of these rumors,

Di pertengahan bulan Agustus secara tiba-tiba harga beras melonjak di Jawa Timur kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, yang mengagetkan dan menggugah perlunya campur tangan pemerintah dengan segera (perhatikan grafik pada halaman 10 yang memberikan gambaran fluktuasi harga beras selama Agustus - Oktober 1998). Untuk dapat mengerti apa yang menjadi penyebab dibalik ketidakstabilan pasar yang tidak terduga, tim peneliti SMERU melakukan perjalanan melintasi Jawa Tengah dan Jawa Timur pada akhir September lalu, terutama ke daerah perkotaan dan pedesaan, termasuk diantaranya daerah yang merupakan kantong-kantong beras di wilayah ini. Selama melakukan investigasi, tim kami telah mewawancarai wakil-wakil kunci dari industri perberasan seperti petani, pemilik penggilingan padi, para pedagang kecil, menengah dan besar, pedagang eceran, penyuluh pertanian, dan aparat di BULOG dan DOLOG.

Ketika secara tidak terduga dan tidak dapat dijelaskan tiba-tiba harga beras melonjak pada pertengahan Agustus lalu, diasumsikan bahwa ini merupakan indikasi penurunan pasokan beras atau ketidakberadaan beras di pasaran. Ternyata, Tim SMERU tidak menemukan masalah pada keseluruhan pasokan. Investigasi menunjukkan bahwa lonjakan harga disebabkan oleh beberapa faktor lain. Faktor-faktor ini termasuk ketidakpastian situasi politik pada pertengahan Agustus diiringi isu sosial yang menyebar; keengganan para pedagang dan pemilik penggilingan padi untuk menangani beras dalam jumlah yang besar; keengganan petani untuk menjual hasil panennya; dan kegagalan aparat DOLOG setempat untuk mengambil langkah cepat dengan memasok tambahan beras apabila diperlukan.

Tim SMERU menemukan bahwa beras tersedia dalam jumlah cukup di pasaran, di gudang-gudang pemerintah, maupun di pedesaan di kedua propinsi dimana saat panen telah dimulai di bulan Agustus. Meskipun produksi beras pada separo semester pertama tahun 1998 menurun yang diakibatkan oleh El-Nino yang berkaitan dengan kekeringan panjang dan oleh pengurangan penerapan pupuk dan pestisida, tingginya curah hujan di musim kemarau telah memperluas area panen dari area yang biasanya diperuntukkan bagi tanaman tembakau (yang tidak tumbuh baik di musim bercurah hujan tinggi) atau tanaman lainnya. Aparat daerah di beberapa wilayah di kedua propinsi melaporkan bahwa tidak ada penurunan yang berarti pada tingkat produksi.

Nampaknya, lonjakan harga secara mendadak ini

several major rice traders in Surabaya and elsewhere closed down their operations for several days, interrupting rice purchases and unloading at the port of Tanjung Perak. Although this action only lasted for a short period it had an immediate impact on the rice trade that reverberated throughout the marketplace in the days that followed.

The market was also unsettled by reports in the national press of the recent arrest of several government officials and traders accused of corruption and collusion over rice purchasing. But despite hearing many rumors throughout both provinces of widespread collusion between DOLOG officials and rice traders to manipulate the market, our research team found no hard evidence to support such allegations. The failure of local DOLOG officials to intervene quickly in the market place when prices surged in mid-August can be explained instead by bureaucratic delays and inertia, as local officials waited for orders from above rather than acting on their own initiative.

In addition, there is some evidence of a reluctance of farmers in certain areas to sell their rice, in part to protect themselves against the possibility of future food shortage, but also out of uncertainty about the current market volatility. In several regions, such as in Pacitan and Wonogiri, senior local officials have issued instructions to prevent farmers from selling their rice on the open market in an attempt to preserve local village foodstocks.

The SMERU team also found evidence that in regions such as Lumajang, Jember, Situbondo and Bondowoso, a few large traders and some rice-mill owners have reduced their operations substantially, either out of fear of being accused by the authorities of hoarding or to prevent losses through theft or pillage if they trade or transport rice in large quantities. (Looting of warehouses and rice-mills occurred in several places in both Central and East Java during late August).

In sum, these factors together resulted in a thinner-than-normal market, but did not appear to have caused any significant shortage in the marketplace; at no time during August or September did rice supplies show any sign of drying up.

Significantly, by the time our team was concluding its investigations at the end of September rice prices in both provinces had begun to decline, especially after the belated arrival of large quantities of DOLOG cheaper 'market operations' rice in the marketplace during September.

Although prices had not returned to June-July levels, the generally sluggish rice trade in late September was disappointing to farmers who had for a short time benefited from the August price surge, especially since many consumers, with substantially reduced purchasing power, are preferring to buy the cheaper DOLOG rice whenever

terutama disebabkan oleh adanya ketidakpastian situasi politik khususnya menjelang hari Kemerdekaan - 17 Agustus yaitu merebaknya issue-issue (yang disebar oleh pihak pers Indonesia) tentang akan adanya demonstrasi anti pemerintah yang diikuti kerusuhan telah membuat keresahan pada masyarakat khususnya masyarakat Tionghoa Indonesia. Sebagai akibat adanya isu-isu ini, sebagian besar pedagang utama beras di Surabaya dan kota lainnya menutup operasinya untuk beberapa hari, menghentikan pembelian beras dan kegiatan bongkar-muat di pelabuhan Tanjung Perak. Walaupun aksi ini hanya terjadi dalam waktu singkat, dampaknya langsung mempengaruhi perdagangan beras ke seluruh pasar beras pada hari-hari sesudahnya.

Pasar juga tidak menentu karena adanya pemberitaan pers nasional tentang penangkapan beberapa aparat pemerintah dan pedagang yang disangka melakukan korupsi dan kolusi di dalam perdagangan beras. Walaupun terdapat isu bahwa terjadi permainan antara DOLOG dan pedagang beras untuk memanipulasi pasar, Tim kami tidak menemukan bukti cukup kuat untuk mendukung isu dimaksud. Kegagalan DOLOG melakukan campur tangan segera di pasaran ketika harga beras meroket pada pertengahan Agustus dapat dijelaskan sebagai akibat birokrasi dan kelambanan, dimana aparat daerah menunggu perintah dari atas ketimbang melakukan aksi atas inisiatif sendiri.

Sebagai tambahan, para petani di beberapa wilayah enggan menjual berasnya, sebagian untuk persiapan kemungkinan masa paceklik, dan sebagian karena adanya ketidakpastian pasar. Pada beberapa wilayah, seperti di Pacitan dan Wonogiri, aparat senior di daerah memperoleh perintah untuk mencegah petani menjual berasnya di pasaran bebas dalam rangka pelaksanaan pengembangan lumbung desa.

Tim SMERU juga menemukan bukti bahwa di wilayah seperti Lumajang, Jember, Situbondo dan Bondowoso, beberapa pedagang besar dan pemilik penggilingan padi telah mengurangi operasinya untuk menghindari tuduhan penimbunan atau kehilangan dari pencurian dan penjarahan jika melakukan pengangkutan beras dalam jumlah yang besar. (Terjadi penjarahan gudang-gudang dan penggilingan padi di beberapa tempat di kedua Propinsi selama bulan Agustus).

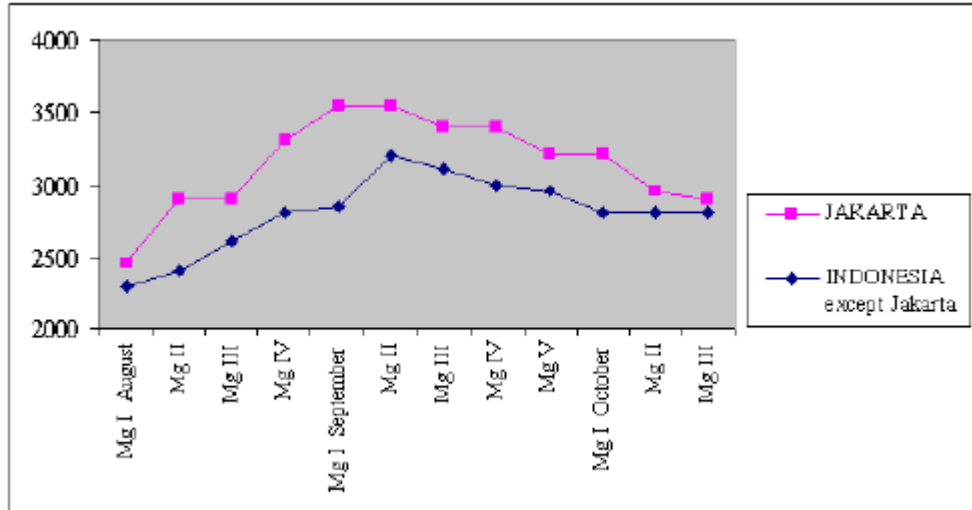
Faktor-faktor ini secara bersamaan membuat penipisan pasokan pasar beras normal, namun tidak satupun faktor-faktor ini menyebabkan anjlok-nya pasokan beras di pasaran, dan tidak ada satu waktupun di bulan Agustus dimana pasokan beras menunjukkan tanda menguap.

Pada saat Tim kami mengakhiri investigasinya, harga beras di kedua Propinsi mulai menurun, khususnya setelah adanya beras murah "operasi pasar " DOLOG secara besar-besaran di pasaran

it is available.

pada bulan September.

Meskipun harga beras tidak akan menyamai tingkat harga pada bulan Juni-Juli, secara umum perdagangan beras di akhir September telah mengecewakan para petani yang dalam waktu singkat telah sempat menikmati lonjakan harga di bulan Agustus, khususnya sejak para konsumen menurun daya belinya dan lebih memilih beras murah DOLOG dimanapun beras itu tersedia.



Impressions from Jakarta

*Siapakah yang paling terkena dampak krisis ekonomi ini?
Bukan penduduk di daerah kumuh tengah kota, akan tetapi mereka yang
dulunya memiliki gaya hidup kota metropolitan.*

Where is the economic crisis striking hardest? Not at the slum dwellers in the city center, but at the once upwardly mobile on Jakarta's outskirts.

Lea Jellinek

The economic downturn has, in fact, given Central Jakarta's kampung dwellers a reprieve from their battles with the developers. The kampung community of Kemayoran, which has been under threat of demolition since 1990, was recently the site of a major fire, destroying 70 houses. Within two months, the kampung dwellers managed to raise money to begin to rebuild. In this period of economic crisis, which parallels the hardship of the 1960's, it remains a mystery how this low income community raised the money and suggests that the kampung dwellers have great faith in the future.

Even during the economic crisis, the city center is still the hub of economic activity. Families have minimal transport costs, police harassment of street vendors has declined, and for those lucky enough to have received low cost flats in the early phase of demolition, housing and basic needs can still be met, usually through family and long established inner-city networks. Vacant land and reduced pollution, two side effects of the down turn in big business, have even opened up some opportunities for increased income gathering, such as market gardening in empty lots and improved mussel harvests in Jakarta Bay.

A very different story is emerging in the south of the city around Depok where many people fled to a new life after being pushed out of the city center. In the south the downturn in big business has meant that the "boomtown" picture of Depok, the consumerism, the middle class aspirations and the single income provided by the husband has been replaced with out-of-work fathers, houses empty of appliances and consumables, women without luxuries or even necessities. Children are crying and families are constantly under pressure. There is often no way back to the city center or to the village; there is nowhere to go and nothing to do.

Recycling rubbish, one year ago regarded as the lowest of occupations in Jakarta, is now the occupation of survivors, able to feed themselves and send money back to the village while the lower middle classes of Depok cannot feed their children. Unlike the Depok kampung dwellers who invested in good houses and consumer goods (buying many of these things on credit), rubbish recyclers never had these opportunities, but they have been able to maintain a foot in the city and a foot in the village,

Lesunya laju perekonomian kenyataannya telah menghentikan pertikaian antara penduduk kampung di kota Jakarta dengan para pengembang. Kampung Kemayoran yang selama ini diancam penggusuran sejak 1990, baru-baru ini terbakar dan menyebabkan hancurnya sekitar 70 rumah tinggal.

Dalam kurun waktu dua bulan, mereka dapat mengumpulkan uang untuk membangun kembali gubuk mereka. Kerasnya kehidupan pada krisis ekonomi seperti sekarang ini kurang lebih sama dengan keadaan serba sulit di tahun 60-an. Bagaimana keluarga-keluarga miskin ini bisa tetap bertahan hidup dan tetap tabah di tengah kekurangannya tetap menjadi misteri.

Bahkan pada krisis seperti sekarang inipun, pusat kota tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi. Tiap keluarga hanya perlu mengeluarkan biaya transpor minim, frekuensi tindak kekerasan polisi pada pedagang asongan di jalan menurun, dan mereka yang beruntung dapat menyewa rumah petakan/flat sederhana. Kebutuhan mendasar lainnya juga masih dapat terpenuhi, biasanya dengan hubungan saling-percaya yang telah terjalin lama. Tanah kosong dan tingkat polusi yang berkurang, dua dampak buruk dari lesunya perekonomian telah membuka kesempatan untuk menambah pemasukan, seperti contohnya warung tenda di areal kosong dan pemulung di Teluk Jakarta.

Tidak demikian halnya dengan penduduk yang tinggal di Selatan Jakarta, seperti halnya Depok, di mana mereka memulai hidup barunya setelah tergusur dari pusat kota. Di Selatan, lesunya laju perekonomian menghilangkan imej kota Depok yang dulu berkembang dengan pesat; konsumerisme, aspirasi tingkat ekonomi kelas menengah, pemasukan tunggal dari suami telah digantikan oleh pengangguran, rumah tanpa perlengkapan modern, wanita tanpa pakaian dan perlengkapan yang layak. Anak-anak menangis dan keluarga terus-menerus berada di bawah tekanan hidup. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tingkat hidup yang terus merosot.

Memulung sampah, setahun lalu dianggap sebagai pekerjaan yang tidak layak di Jakarta, sekarang menjadi sumber penghasilan yang masih bisa diandalkan; dapat memberi mereka makan bahkan mengirimkan sebagian uangnya ke kampung

earning where money is greatest, spending where it goes furthest; their income stream, however meagre, has at least remained steady.

For the newly poor, activities once reviled are now sources of survival in times of adversity. Women who were once housewives are turning to household trade, massage or domestic service.

Help from relatives, neighbours and friends is one of the most important survival mechanisms. Those who have more, help those who have less. Some of the middle class and rich are making contributions of rice to people who now cannot eat each day. The NGO's play a critical role in distributing these resources, from rich to poor, but not enough of this is going on.

Most of the rich still pretend that Indonesia is not in crisis and are living life as usual. The gap is expanding between those who have resources and those who have none; the rich are distancing themselves from the problem; the poor are getting more desperate. Crime is growing and with it fear.

halaman. Sementara masyarakat menengah ke bawah di Depok sekarang tidak lagi bisa memberi makan anak-anak mereka. Tidak seperti penduduk perkampungan di Depok - yang dulu menanamkan uangnya dalam bentuk rumah bagus dan membeli barang mewah dengan sistem kredit - pemulung sampah yang sebagian hidupnya dihabiskan di kota besar dan sebagian yang lain di desa asal, masih tetap dapat mengumpulkan uang dan menggunakannya dengan berhemat; setidaknya, tingkat kehidupan mereka sampai saat ini tetap stabil, walaupun jumlahnya kecil.

Bagi orang yang tiba-tiba jatuh miskin, kegiatan yang dulu enggan untuk dilakukan, sekarang menjadi andalan demi kelangsungan hidup. Wanita-wanita yang tadinya hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sekarang menjual keperluan rumah tangga, pijat atau melakukan jasa lainnya.

Bantuan dari keluarga, tetangga dan teman adalah mekanisme daya tahan hidup yang paling penting. Mereka yang memiliki lebih memberikan bantuan pangan kepada orang tak punya. Di sini LSM berperan banyak dalam mendistribusikan berbagai sumbangan, walaupun sebetulnya masih belum mencukupi.

Banyak orang kaya yang masih bersikap seolah-olah Indonesia memang tidak mengalami krisis perekonomian, mereka masih menjalani hidup mereka seperti biasa. Kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang tak punya semakin besar. Mereka tidak mau melihat berbagai kesulitan hidup, sehingga yang miskin semakin menderita. Kejahatan meningkat di mana-mana, ketakutan merajalela.

Lea Jellinek is a prominent social historian who has been conducting research on Jakarta's poor communities and itinerant street traders for the past twenty years. Author of the highly regarded *The Wheel of Fortune: The history of a poor community in Jakarta* (1991), Lea is currently a Research Associate at Melbourne University, Australia. The following article is based upon her first impressions of the impact of the Indonesian crisis during a recent visit.

AND THE DATA SAY

Droughts in Java and Bali since 1950

It is not known whether 1997-1998 was the peak in a cycle of droughts, or part of an on-going trend, because no-one can predict the future....
There will be more droughts, and they might be as severe as that of 1997-1998.
We need to be ready for them

Derek Holmes

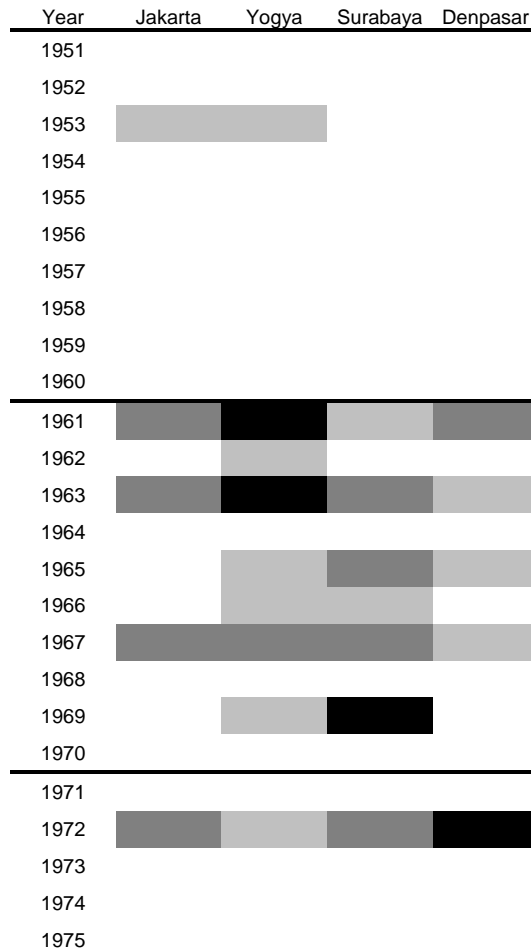
1997-1998 produced the worst drought since records began, with very severe consequences on food supply for a country already reeling from the shocks of an economic crisis. Indonesia is no stranger to drought. It happens nearly every dry season in East Java and Nusatenggara. About once every five or ten years, there is a more widespread and severe drought, related to global variations in ocean currents (named "El Nino") that scientists are still trying to understand so that predictions can be made.

The Jakarta rainfall record commenced in 1864, and several other stations opened in Indonesia during the 1880s and 1890s; many more followed in the opening years of the present century. These historical data have been the subject of a review by Derek Holmes at the World Bank to investigate whether or not this latest drought was an exceptional event.

1997-1998 tercatat sebagai kemarau terburuk sepanjang sejarah, yang menambah kesulitan pangan di negara yang terkena dampak krisis ekonomi. Indonesia tidak asing lagi dengan kemarau, bahkan sering terjadi di daerah kering seperti halnya Jawa Timur dan Nusa Tenggara. Biasanya sekali dalam 5 atau 10 tahun terjadi kemarau panjang yang merata, bergantung kepada arah angin laut (El Nino), ilmuwan masih meneliti untuk mendapatkan perhitungan yang lebih akurat.

Pencatatan curah hujan di Jakarta dimulai sejak tahun 1864, dan beberapa stasiun pencatat dibuka sejak 1880 dan 1890-an; beberapa dibuka di awal abad 20 ini. Data historis ini menjadi subyek penelitian oleh Derek Holmes di World Bank untuk memeriksa lebih jauh apakah kekeringan akhir-akhir ini merupakan kejadian luar biasa.

The review has shown that there has been a dramatic increase in droughts especially over the past three decades. There were about twelve years with droughts in the 70 years up to 1940, but at least twelve more in the 38 years since 1960. Not only have they increased in frequency, they have also increased in severity and in geographical extent. The north-west regions of Sumatra and Kalimantan were relatively immune until recently. The attached chart shows the distribution of droughts in four main cities of Java and Bali since 1951. The main increase has been since 1960, but the recent events of the 1980s and 1990s have been much more widespread.

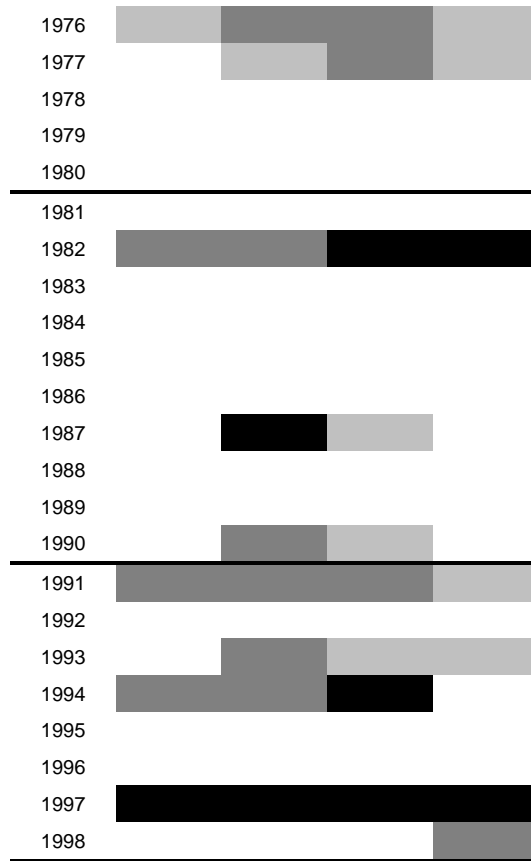


Laporan menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dramatis tingkat kekeringan pada tiga dekade terakhir. Kekeringan melanda selama 12 tahun dari total 70 tahun sampai dengan tahun 1940, dan sekurangnya dua belas tahun dari total 38 tahun terjadi sejak 1960. Tidak hanya kenaikan dari segi frekuensi, tapi juga dari tingkat kekeringan dan luas geografis. Daerah di Utara-Timur Sumatra dan Kalimantan. Grafik di bawah ini menunjukkan distribusi kekeringan di empat kota besar di Jawa dan Bali sejak 1951. Kenaikan yang berarti terlihat sejak tahun 1960, akan tetapi kekeringan tahun 1980 dan 1990-an lebih merata di berbagai daerah.

It is not known whether 1997-1998 was the peak in

Tidak diketahui apakah 1997-1998 merupakan

a cycle of droughts, or part of an on-going trend, because no-one can predict the future. What is important is that the present good rains should not allow us to forget about the problem. There will be more droughts, and they might be as severe as that of 1997-1998. We need to be ready for them.



pusat dari musim kering ataukah hanya siklus tren yang sedang berlangsung saat ini. Yang patut kita perhatikan adalah tingginya curah hujan belakangan ini jangan membuat kita lupa akan bahaya kekeringan yang mungkin melanda dalam waktu dekat. Dan kita harus selalu waspada!



Derek Holmes is an environmental land use planner with wide Indonesia experience and a life-long interest in climate and weather patterns.